

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki sumber daya alam yang beragam di setiap wilayahnya. Potensi Negara Indonesia juga beraneka ragam seperti dalam hal pariwisata, budaya, dan keseniannya. Potensi tersebut seharusnya dikembangkan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi mancanegara. Seperti yang kita ketahui bahwa turis datang ke Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan pariwisata (Yoeti, 1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu kata “pari” dan kata “wisata”. Pari memiliki arti banyak, berulang kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini memiliki sinonim dengan kata “*travel*” dalam Bahasa Inggris. Sehingga dengan kata lain “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat menuju ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*tour*”.

Kegiatan kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan untuk memajukan dan menambah pendapatan daerah, mengembangkan dan memberikan kesempatan berusaha serta penyebaran lapangan kerja, memotivasi laju pembangunan daerah, mempromosikan dan mendayagunakan pesona pariwisata dan tujuan wisata di Kota Bontang. Pembangunan dan pengembangan daerah wisata dilakukan dengan pendekatan kemajuan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang mengarahkan kepada pengembangan dan pembangunan wilayah, bertitik berat pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat

yang melingkupi berbagai perspektif seperti sumber daya manusia, jual beli dan *marketing*, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas area, pemberdayaan usaha kecil dan ekonomi serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam UU. No 10/2009 telah ditegaskan bahwa kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan *global*. Maka dengan demikian seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Pariwisata memiliki fungsi penting bagi suatu daerah karena dapat memicu perkembangan daerah tersebut. Adikampana (2017) juga menjelaskan bahwasanya pariwisata dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat terutama dalam kenaikan tingkat perekonomian seperti adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan usaha. Tidak hanya untuk masyarakat saja, dengan adanya pariwisata ini juga dapat meningkatkan perekonomian bagi Kota atau Kabupaten setempat, dapat meningkatkan sosial dan budaya, dan meningkatkan pertumbuhan pertahanan keamanan (Purnomo dan Puntorini, 2018). Mengacu pada hal tersebut maka potensi sumber daya wisata daerah perlu dikembangkan secara terintegrasi dalam perencanaannya dan dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan di sektor lainnya.

Perencanaan pada hakikatnya merupakan tahapan dalam memilih apa yang ingin diperoleh pada masa tertentu, mencakup waktu tertentu serta menetapkan

tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Rudianto, 2009: 52). Robbins dan Coulter (dikutip dari Trisnawati dan Sule, 2005: 96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta mendefinisikan struktur perencanaan secara garis besar untuk menggabungkan dan menyelaraskan seluruh kegiatan organisasi hingga terwujudnya visi, misi, serta tujuan organisasi.

Dalam UU. No 25/2004 ditegaskan, bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan suatu sistem yang didalamnya memuat satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilakukan oleh berbagai unsur penyelenggara baik dari tingkat masyarakat hingga pusat. Adapun untuk rencana jangka panjang adalah perencanaan untuk 20 tahun. Rencana jarak menengah adalah perencanaan untuk 5 tahun. Rencana jangka pendek adalah perencanaan untuk 1 tahun.

Peter Drucker melalui bukunya *The Practice of Management* (1954) mempublikasikan tentang *Management by Objective* yaitu sebagai metode pemilihan destinasi secara partisipatif, MBO merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari pemilihan destinasi, implementasi, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuan utama MBO adalah memotivasi kontribusi komunitas atau masyarakat dan menginformasikan serta mengkomunikasikan tujuan, serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada

hakikatnya MBO menitik beratkan kepada peranan tujuan krusial dalam perencanaan efektif (Priyono, 2007:67).

Setelah mengetahui metode perencanaan tersebut, selanjutnya perlu untuk dilakukan evaluasi yang menjadi suatu tahapan yang sangat penting, hal ini karena dapat menentukan efektivitas seluruh aspek perencanaan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa keberhasilan dari suatu program berawal dari suatu rancangan atau rencana yang telah disusun dengan tepat dan cermat, maka dari itu suatu rencana perlu untuk dievaluasi ulang guna memastikan ketepatannya. Sesuai dengan pernyataan Alexander dan Faludi 1989 dan Mastop 1997 (dikutip dalam buku Alexander, 2006) bahwa evaluasi rencana ini sangat penting untuk mengumpulkan pemikiran dan menilai serta menentukan baik atau tidaknya suatu rencana yang telah disusun. Evaluasi rencana berbeda dengan evaluasi program, yang mana evaluasi program merupakan sesuatu yang telah disusun dan telah disetujui.

Secara lebih luas evaluasi merupakan suatu aktivitas untuk mengukur tingkat kemampuan atau potensi suatu program atau kebijakan. Terdapat tiga jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu *a priori evaluation* atau yang sering dikenal sebagai evaluasi rencana, evaluasi ini dilakukan saat melakukan pengembangan program dalam tahap perencanaan. *Evaluation progress* atau evaluasi yang dilakukan dalam tahap proses pelaksanaan program, dan *evaluation ex post facto* atau evaluasi yang dilakukan setelah program dilakukan (Alexander, 2006).

Cronbach (dikutip dalam Mokodongan, et al, 2019) menjelaskan secara umum bahwa evaluasi merupakan suatu proses dalam penggambaran dan

pengumpulan informasi untuk kemudian disajikan sebagai bahan pertimbangan, penilaian dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Proses evaluasi akan tetap berlanjut sampai kemungkinan untuk dilakukan evaluasi kembali apabila terdapat adanya kesalahan.

Oliveira dan Pinho (dikutip dalam Guyadeen & Seasons, 2016) juga menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian aspek-aspek (tujuan, sasaran, dan kebijakan) yang disusun dalam sebuah rencana pembangunan tata ruang wilayah, serta menghasilkan hasil dari sebuah rencana yang efektif dengan mempertimbangkan konteks dari lokasi perencanaan yang akan dioperasikan. Evaluasi sebagai penelitian atau wadah untuk menggabungkan, mengkaji, dan menyediakan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, menghitung dengan cara membandingkannya dengan parameter evaluasi dan hasilnya dipakai untuk mengambil keputusan tentang objek evaluasi. Menurut Morckel (dikutip dalam jurnal Guyadeen & Seasons, 2016) juga mengungkapkan bahwa evaluasi perencanaan ini dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana, proses keefektifan perencanaan, kualitas rencana, dan keberhasilan implementasi rencana.

Tujuan diadakan evaluasi perencanaan yaitu untuk menghasilkan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya melalui beberapa penilaian yang sistematis (Oliveira & Pinho, 2011), dan untuk menilik lebih lanjut terkait rancangan-rancangan kebijakan yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dan sudah tepat sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga pengembangan

pariwisata daerah dapat berjalan dengan efektif dan sesuai rencana. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi perencanaan agar rencana bisa menjadi efektif, yaitu perlu adanya kesinambungan antara komponen-komponen utama dari sebuah rencana yaitu tujuan, sasaran, dan kebijakan dengan mekanisme implementasi. Rencana tujuan dan sasaran harus disusun dengan jelas, kebijakan-kebijakan yang ingin ditetapkan harus dapat terukur dan dioperasionalkan dengan jelas sehingga rencana yang dibuat dapat terus dikembangkan dan menghasilkan rencana yang efektif dalam pengembangan tata ruang wilayah (Oliveira dan Pinho. 2010b).

Pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata ini merupakan suatu aktivitas yang berdasarkan kelompok, yaitu potensi yang dimiliki alam dan keunikan kelompok serta kearifan lokal yang berupa nilai-nilai, norma-norma, adat dan tradisi yang melekat pada kelompok tersebut adalah elemen penggerak yang paling esensial bagi aktivitas pokok budaya dan tradisi komunitas itu sendiri. Dalam perspektif lain, komunitas setempat yang tumbuh dan berkembang berdekatan dengan suatu objek wisata sebenarnya sudah menjadi suatu bagian dari sebuah timbal balik dengan lingkungan sekitarnya baik sumber daya alam (budaya) dan pariwisata (Murphy, 1988).

Kebijakan destinasi wisata meliputi pengembangan struktur wilayah, pengembangan daya tarik, serta aksesibilitas dan prasarana transportasi. Salah satu yang termuat ialah wacana untuk mengembangkan prasarana dan sarana kepariwisataan sebagai upaya pemerataan distribusi wisatawan. Pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memajukan kapasitas sarana dan prasarana

destinasi wisata, memajukan kualitas dan kapasitas usaha, industri dan investasi pariwisata, memajukan pertunjukan seni, *event* wisata yang berkualitas tersusun dan berkesinambungan serta membangun akses dan jalan masuk ke daerah destinasi wisata. Pengembangan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang bertujuan untuk memandu jalannya pengembangan tersebut, sehingga pada kajian ini dibahas mengenai rencana induk pengembangan pariwisata serta tujuan akhirnya dikaji dengan cara evaluasi. Tahap pertama dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah adalah panduan dalam pengembangan objek wisata daerah yang memuat Materi Pokok Ketentuan Program Kepariwisata Kota, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan objek wisata atau kawasan (Kerangka Acuan Kerja RIPPDA Bontang, 2015).

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan titik tolak yang sangat strategis untuk dapat mengoptimalkan dengan menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, setiap daerah harus mencermati sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan dapat membantu menopang pembangunan daerah, memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan.

Maksud dari disusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA) ialah sebagai referensi panduan dalam perencanaan pembangunan pariwisata di daerah sebanding dengan potensi-potensi wisata yang ada, sehingga dapat menjadi daya tarik daerah. Proses RIPPDA ini berupaya untuk mengantarkan dan meneruskan kepentingan dari “*bottom up*” atau dari level masyarakat ke pemerintah. Sehingga perspektif yang dihasilkan bukan hanya sebagai arsip tentang pengelolaan dan manajemen dari pemerintah daerah, namun merupakan hasil kontribusi masyarakat.

Kota Bontang dengan luas wilayah ± 49.757 ha, yang terdiri dari daratan seluas ± 14.780 ha atau 29,70 persen) dan lautan seluas ± 34.977 atau 70,30 persen (Data Pembangunan Kota Bontang, 2018). Bisa disimpulkan bahwa sebagian besar luas Kota Bontang adalah lautan, maka wilayah yang dapat dikembangkan adalah Pariwisata Bahari yang sangat potensial sebagai pendapatan daerah terutama pasca migas. Selain itu, kelebihan yang dimiliki Kota Bontang seperti keindahan pantai pasir putih di Pulau Beras Basah, hutan mangrove dan terumbu karang yang terdapat pada Pulau Kedindingan, keindahan waduk dan makam toraja di Danau Kanaan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya RIPPDA *planning* dalam mengembangkan dan membangun objek wisata akan memperoleh titik terang mengenai kebijakan pengembangan dalam bentuk fisik dari pemerintah daerah Kota Bontang, termasuk prediksi terhadap pasca migas, unit pariwisata. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang (Disbudpar Kota Bontang (2012:9), Objek wisata memiliki ciri khas sendiri yang kemudian dapat dijadikan produk wisata suatu destinasi maupun objek

wisata. Sebagian besar potensi dan daya tarik yang terdapat di Kota Bontang didominasi oleh wisata alam, yang merupakan wisata unggulan Kota Bontang (Lakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bontang, 2015).

Keadaan wilayah dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kota Bontang merupakan sumber daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Bontang, sehingga ~~dalam~~ pariwisata tersebut akan menjadi sumber kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bontang, untuk membenahi potensi-potensi pariwisata dan aspek-aspek standar pariwisata, agar pembangunan daya tarik wisata nantinya dapat lebih terencana dan sesuai dengan permintaan wisatawan. Maka dari itu, penelitian ini mengambil kajian tentang evaluasi perencanaan pengembangan pariwisata daerah kota Bontang dan kajian ini juga membahas tentang proses rencana induk pengembangan pariwisata daerah di Kota Bontang. Berdasarkan latar belakang dan sebab-sebab yang menarik untuk diteliti maka peneliti mengangkat kajian ini dengan judul “*Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kota Bontang Kalimantan Timur*”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Proses Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tentang daya tarik wisata yang ada di Kota Bontang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui kendala dan efektivitas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Mengungkapkan kajian evaluasi kebijakan perencanaan, dalam hal ini perencanaan pembangunan pariwisata daerah (RIPPDA) untuk memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perencanaan bidang pariwisata.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan rekomendasi pengambilan kebijakan kepada pemerintah atau pihak swasta dan *stakeholder* terkait pengembangan destinasi wisata, objek wisata, maupun atraksi wisata.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Evaluasi

Worthen dan Sanders (1979:1) menyatakan evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Dalam kehidupan evaluasi sudah banyak dipakai dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan,

oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan judul yang berkaitan dengan evaluasi. Dengan adanya penelitian terhadap evaluasi perencanaan ini diharapkan dapat mengenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rencana kerja di bidang pariwisata Kota Bontang selama ini.

Purwanto (2002) memberikan pengertian bahwa evaluasi secara garis besar dapat dikatakan sebagai pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Dengan kata lain, evaluasi bisa diartikan sebagai metode *planning*, mendapatkan, dan memfasilitasi sumber informasi yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pilihan-pilihan keputusan. Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi berguna untuk memberikan penilaian terhadap program kerja pemerintah baik itu positif atau negatif.

National center for chronic disease prevention and health promotion dalam *CDC Workbook* tahun 2011 juga mengungkapkan bahwa evaluasi perencanaan merupakan suatu kegiatan dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi terkait rancangan program-program yang akan dilakukan seperti daftar program yang akan dilakukan, cara melaksanakan program, tujuan dilaksanakan program, manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan program.

Terdapat tiga tipe evaluasi perencanaan menurut Oliveira & Pinho, 2010a yaitu *ex ante* atau *a priori*, *on going* dan *ex post*. Berikut penjelasannya:

1. *Ex ante (a priori)*

Tipe evaluasi perencanaan yang pertama yaitu *ex ante*, evaluasi ini dilakukan saat awal proses perencanaan yang mana dilakukan perbandingan antar

alternatif yang sudah tersedia dan mengemukakan berbagai alternatif lain agar mendapatkan solusi terbaik mengenai rencana pengembangan lebih lanjut.

2. *On going*

Kemudian ada *on going*, evaluasi ini dilakukan selama berjalannya implementasi rencana sampai menghasilkan kesimpulan yang dapat menyebabkan pergeseran dalam proses perencanaan. Dalam hal ini, perlu fokus pada hasil identifikasi rencana awal dan penggunaan sumber daya sehingga bisa mendapatkan berbagai sumber informasi yang memadai dan bisa menentukan apakah hasil rencana sesuai atau tidak.

3. *Ex post*

Terakhir ada *ex post*, tipe ini dilaksanakan diakhir implementasi rencana dan berfokus pada dampak rencana. Pada evaluasi ini mengkaji seluruh proses persiapan dan implementasi rencana dan merumuskan penilaian mengenai daftar alternatif yang berhasil dan akan digunakan.

Terdapat sembilan kriteria dalam melakukan evaluasi perencanaan yang dijelaskan oleh Oliveira dan Pinho (2009, 2010b) yaitu koherensi internal, *interpretation of plan system*, rencana relevan dengan kebutuhan kota atau wilayah, koherensi eksternal, komitmen dalam hal keuangan dan sumber daya, *public participation in plan making and implementation*, *plan utilisation*, keefektifan hasil rencana dan pengarahannya dalam proses pengembangan kota atau wilayah. Dari hasil *assessment* kesembilan kriteria tersebut, akan diperoleh informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan jenis sumber daya yang dimiliki, sumber daya keuangan yang dimiliki selama proses berlangsung, hasil analisa

rencana dalam konteks sistem perencanaan yang dimiliki, dan mekanisme pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

Adapun prinsip-prinsip dalam evaluasi perencanaan yaitu 1) *planning practice should be evaluated*, dalam hal ini melakukan evaluasi rencana sangat kompleks dan sulit maka perlu untuk latihan dalam melakukannya, 2) desain metodologi penilaian harus jelas dan dikaitkan dengan teori, 3) metodologi evaluasi harus sesuai dengan objek yang akan dinilai, dalam hal ini setiap rencana yang akan dipraktikkan akan selalu dikaitkan dengan lingkungan wilayah, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum yang berlaku sehingga metode-metode evaluasi perlu sejalan agar bisa mendapatkan hasil evaluasi yang benar dan tidak ada pihak yang dirugikan, 4) pelaksanaan evaluasi perencanaan (rencana, proses, hasil) perlu dievaluasi secara menyeluruh, 5) evaluasi dan perencanaan harus dikembangkan secara bersamaan dan tidak dilihat sebagai dua proses yang terpisah, 6) proses evaluasi harus terus dikembangkan dan diseimbangkan dari waktu ke waktu yang melibatkan ketiga tipe evaluasi yaitu *ex ante*, *on going*, dan *ex post*, dan 7) hasil evaluasi rencana yang telah dibuat perlu disajikan dan disampaikan pada berbagai pihak seperti para pembuat rencana, politisi, dan masyarakat dengan cara yang dapat mereka pahami. (Olivier & Pinho, 2010a).

Evaluator adalah bagian (individu atau organisasi) yang melaksanakan evaluasi dalam melakukan suatu aktivitas. Kegiatan yang dijalankan oleh *evaluator* antara lain membuat *planning* evaluasi, melangsungkan atau menjalankan evaluasi (atau memakai staf pekerja untuk menjalankan evaluasi), berdiskusi dan berkoordinasi dengan seluruh pengelola kepentingan (tidak ada sub-ordinasi),

menganalisis standar pendayagunaan, memilih, mengumpulkan, mengkaji, mengartikan, menjelaskan dan melaporkan data serta temuan, memberikan saran, mengatur anggaran, mengevaluasi dan memajukan teori perubahan atau evaluasi (Nurcholis, 2007:274)

1.5.2 Perencanaan dan Paradigma Perencanaan

Pengertian perencanaan atau *planning* menurut Suandy (2001:2) adalah suatu tahapan pemilihan tujuan lembaga dan kemudian menyediakan dengan jelas program-program, metode-metode, dan operasi yang dibutuhkan untuk terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan dari perencanaan pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bontang berguna untuk menentukan strategi dan taktik yang memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan kawasan wisata. Organisasi atau instansi terkait memiliki peran besar dalam perencanaan pengembangan pariwisata seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) dan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selanjutnya adalah paradigma perencanaan yang dikemukakan oleh Campbell dan Fainstein (1996) dengan menggunakan paradigma *rasionalisme* karena jenis paradigma ini berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Fungsi *planning* atau perencanaan disini merupakan suatu kegiatan secara umum, komunitas yang mendeskripsikan dan mengatur pengembangannya sendiri dengan cara yang logis. Esensi *planning* atau perencanaan dalam model ini adalah objektivitas atau mengimplementasikan hal yang logis, melaksanakan pada keadaan yang natural, memiliki gambaran yang jelas dan menyeluruh, acara-acaranya disusun untuk

dievaluasi dan menyampaikan kesempatan bagi adanya aktivitas pemecahan masalah (*problem solving*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga harus memiliki akal dan selalu mengawasi perencanaan pembangunan khususnya bidang pariwisata yang ada di Kota Bontang. Berdasarkan luas cakupan masalah dan jangkauan waktunya perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk:

1. Rencana global, ini merupakan penentuan tujuan yang menyeluruh atau keseluruhan dan yang menyangkut jangka panjang dari organisasi tersebut sebagai keseluruhan atau totalitas (Gitosudarmo, 1990:136).
2. Rencana strategis, rencana ini diatur untuk menetapkan tujuan-tujuan suatu aktivitas yang memiliki makna diplomatis dan berukuran jangka panjang. Makna strategis dalam pembentukan rencana ini adalah untuk membentuk dan menentukan urutan aspek mana yang akan dicapai terlebih dahulu dan berikutnya. Untuk membentuk rencana strategis kita harus memahami keadaan saat ini dan dikaitkan dengan pembangunan atau perkembangan masa depan yang sangat memungkinkan terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengganti keadaan sesuai tujuan yang diinginkan. Dilihat dari format waktunya perencanaan strategis merupakan perencanaan atau *planning* dalam waktu yang lama dan biasanya dibuat oleh sebuah badan yang mengatur dari atas. Perencanaan strategis mengenai suatu ketetapan bertujuan untuk menentukan tujuan apa yang ingin diperoleh oleh perusahaan secara keseluruhan, dan

instrumen apa yang dipakai untuk memperoleh tujuan tersebut (Gitosudarmo, 1990:140).

3. Rencana operasional, yaitu meliputi perencanaan terhadap kegiatan kegiatan operasional yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis (Gitosudarmo, 1990:142).

Menurut (Handoko, 1999:79), proses perencanaan adalah suatu program tentang jalannya suatu aktivitas yang kita rencanakan. Ada tiga pendekatan dalam proses perencanaan yaitu:

1. Pendekatan kemajuan yang bermanfaat.
2. Pendekatan SWOT. SWOT merupakan teknik perencanaan strategis yang memanfaatkan suatu evaluasi dari segi kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman.
3. Pendekatan portofolio dan kesenjangan perencanaan.

Perencanaan pariwisata merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daerah tujuan wisata yang merupakan suatu proses dinamis penentuan tujuan, yang secara sistematis mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan, implementasi terhadap alternatif terpilih dan evaluasi. Komponen dasar pengembangan pariwisata di dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut; (a) Atraksi wisata dan aktivitasnya, (b) Fasilitas akomodasi dan pelayanan, (c) Fasilitas wisatawan lainnya dan jasa seperti operasi perjalanan wisata, *tourism information*, restoran, *retail shopping*, bank, *money changer*, *medical care*, *public safety*, dan pelayanan pos, (d)

Fasilitas dan pelayanan transportasi, (e) Infrastruktur lainnya meliputi persediaan air, listrik, pembuangan limbah dan telekomunikasi, (f) Elemen kelembagaan yang meliputi program pemasaran, pendidikan dan pelatihan, perundang-undangan dan peraturan, kebijakan investor sektor swasta, organisasi struktural *private* dan *public*, serta program sosial ekonomi dan lingkungan (Yoeti, 1991).

Kotler dan Armstrong (2008:267-268) menyatakan terdapat tiga tingkat produk dan jasa. Suatu jenis produk dapat dibagi menjadi tiga jenis tingkatan yaitu:

1. Manfaat inti (*core customer value*), merupakan tingkatan paling dasar yang menjawab apa yang benar-benar dibeli konsumen. Produk harus mendefinisikan inti, manfaat penyelesaian masalah atau jasa yang dicari oleh konsumen.
2. Produk aktual (*actual product*), merupakan aktualisasi manfaat inti menjadi produk. Produk ini dibangun untuk menjaga manfaat inti dengan konsumen tetap terhubung.
3. Produk tambahan (*augmented product*), merupakan tingkatan produk terakhir yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual yang menawarkan layanan dan manfaat tambahan bagi konsumen.

Dari teori dan tiga jenis tingkatan diatas disimpulkan manfaat inti di kawasan pariwisata yang seharusnya ada yaitu barang-barang yang sangat dibutuhkan konsumen, seperti di pantai, para penduduk atau penjual di sekitar dapat menjajakan beberapa jasa seperti *banana boat* dan jasa foto wisatawan yang dapat berguna serta meningkatkan pemasukan penduduk di sekitar kawasan wisata tersebut. Selanjutnya, produk aktual yang merupakan sebuah tindakan dari manfaat inti yang

ada sebelumnya. Dengan adanya produk dan jasa yang nyata dapat memberikan respon positif terhadap kawasan wisata tersebut. Lalu produk tambahan merupakan suatu pelengkap dalam kawasan pariwisata seperti para penduduk sekitar dengan menjual makanan dan minuman yang dapat membuat para wisatawan betah berlama-lama di kawasan wisata tersebut.

1.5.3 Teori Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Menurut Winarno (2007:15), kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak golongan yang berpendapat bahwa pengertian tersebut dijelaskan masih sangat umum untuk dipahami, karena apa yang diartikan dengan kebijakan publik dapat melingkupi banyak macam. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas termasuk dengan lingkungan, oleh karena itu kebijakan untuk melakukan evaluasi perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang sangat menjanjikan. Pemerintah menjadi tahu apa saja hambatan-hambatan yang ada pada sektor pariwisata sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadikan pariwisata Kota Bontang lebih baik lagi. Kebijakan publik bisa dipandang dengan suatu hal apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2009). Dapat disimpulkan kajian ini menitikberatkan bahwa kebijakan publik adalah tentang figur dari “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan aspirasi pemerintah atau tokoh publik semata. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pariwisata termasuk sebuah tindakan dalam tujuan mengembangkan pariwisata dan kebijakan

ini memiliki kualitas dan kuantitas untuk memberikan perencanaan yang baik bagi sektor pariwisata.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang dibuat para pejabat dan pemegang kekuasaan pemerintah harus sepenuhnya dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh para *stakeholders* (Agustino, 2009:7).

Pariwisata yang merupakan industri multisektoral melibatkan banyak *stakeholder* dalam proses pengembangannya, dengan demikian pengembangan pariwisata dalam hal ini membutuhkan dukungan atas sebuah kebijakan yang memiliki kejelasan dari apa yang menjadi standar kebijakan serta sasaran yang seperti apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut (Arfandi, 2015:9).

Kebijakan publik yaitu "*the autorative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menjelaskan bahwa hanya pengambil kekuasaan dalam struktur politik (pemerintah) yang secara formal dapat mengamalkan sesuatu pada masyarakatnya dan alternatif pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu ditunjukkan dalam bentuk pendistribusian. Faktor yang menyebabkannya yaitu pemerintah tergolong ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para pejabat dalam struktur politik yang terlibat dalam lingkup struktur politik sehari-hari dan memiliki tanggung jawab dalam suatu persoalan tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di

kemudian hari kelak, diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu (Agustino, 2009:19).

1.5.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid

dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

Tabel 1.1. Kriteria Evaluasi Menurut Dunn

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho R. 2014. *Public Policy*.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai

evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (*outcome*) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn(1999) dalam Nugroho (2014) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis (Nugroho, 2014).

Tabel 1.2. Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Versi Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk	Teknik
Evaluasi semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	1. Eksperimental sosial 2. Akuntansi sistem sosial 3. Pemeriksaan sosial 4. Sintesis riset dan praktik	1. Sajian grafik 2. Tampilan tabel 3. Angka indeks 4. Analisis seri waktu terinterupsi 5. Analisis seri terkontrol 6. Analisis diskontinyu regresi.
Evaluasi formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	1. Evaluasi perkembangan 2. Evaluasi eksperimental. 3. Evaluasi proses retrospektif (<i>expost</i>) 4. Evaluasi hasil retrospektif	1. Pemetaan sasaran 2. Klarifikasi nilai 3. Kritik nilai 4. Pemetaan hambatan 5. Analisis dampak silang 6. <i>Discounting</i>
Evaluasi Keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal maupun diam-diam merupakan	1. Penilaian tentang dapat tidaknya di evaluasi 2. Analisis utilitas multi atribut, yaitu serangkaian prosedur yang diciptakan untuk	1. <i>Brainstorming</i> 2. Analisis argumentasi 3. Delphi kebijakan 4. Analisis survei pemakai, yaitu serangkaian prosedur untuk

	yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan.	mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya mengenai evaluabilitas suatu kebijakan atau program.
--	--	--	--	--

Sumber: Nugroho R. 2014. *Public Policy*.

1.5.5 Evaluasi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator kinerja. Menurut Nugroho (2014), indikator kinerja selanjutnya akan digunakan untuk menjawab:

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan? Jawabannya berkaitan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* implementasi kebijakan.
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Pertanyaan ini berkenaan dengan "tugas" pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah (*actional variable*) atau variabel lain yang tidak dapat diubah sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

1.5.6 Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Dalam Kerangka Acuan Kerja RIPPDA (2010) perencanaan pariwisata yang berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan wisatawan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan destinasi dan masa depan lingkungan. Dengan demikian, alam lingkungan hidup dan kelestariannya penting untuk diperhatikan dan mendapat perlindungan agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Instrumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dapat terimplementasi sebagai berikut:

1. Rumusan program penataan ruang kota.
2. Rumusan rencana lokasi berikut pemanfaatannya.
3. Indikasi pengelolaan pasca pelaksanaan dengan kegiatan:
 - a. Kajian terhadap kondisi di lapangan terdiri dari:
 - 1) Kajian tanah dan struktur tanah
 - 2) Kajian kondisi sarana dan prasarana
 - 3) Kajian terhadap potensi pelaksanaan desain
 - b. Survei lapangan terdiri dari:
 - 1) Jenis tanah luas kawasan
 - 2) *Site plan* kawasan
 - 3) Kualitas dan kuantitas
 - c. Kajian perhitungan teknis
 - 1) Rencana struktur lapangan
 - 2) Rencana luas kawasan yang ditata
 - d. Struktur tata ruang

- 1) Tata hijau yang diungguli oleh hutan mangrove dan hutan rakyat yang kurang terstruktur dengan baik agar dilakukan penyusunan yang rapi dan teratur sehingga dapat menjadi salah satu aset ruang hijau kota.
- 2) Pesisir pantai dan terumbu karang yang belum bermanfaat diharapkan memenuhi syarat berdasarkan analisis sehingga menjadi daya tarik pariwisata.
- 3) Wisata bahari, wisata kuliner dan wisata pulau-pulau kecil

e. Konsep pendekatan

- 1) Pendekatan tradisional, pendekatan yang dilakukan mengacu pada batasan-batasan komunitas adat dan budaya, baik berupa simbolisme maupun yang lainnya sehingga pada makna-makna tertentu menghasilkan kearifan lokal.
- 2) Pendekatan ekologis, pendekatan yang mengacu pada pelestarian lingkungan.
- 3) Pendekatan ruang, pendekatan yang dilakukan dengan memadukan antara konstruksi formal dan fisik dengan konstruksi sosial dan ekonomi sehingga menghasilkan perpaduan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan industri.
- 4) Pendekatan partisipatif, pendekatan yang dilakukan dengan wawancara, sosialisasi atau seminar.

Perencanaan pengembangan pariwisata diharapkan akan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan dengan cara mengurangi kesenjangan antar wilayah serta

mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membangun Pariwisata nusantara dalam memupuk persatuan dan cinta tanah air. Pembangunan pariwisata memerlukan konsep dan strategi yang jelas. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 8, perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Perencanaan pengembangan objek wisata alam dapat dilihat dari berbagai aspek seperti sistem perencanaan kawasan, koordinasi lintas sektoral, penataan wilayah, standarisasi, pengidentifikasian potensi, pendanaan, dan sistem pelayanan informasi (Noer, 2011).

1. Aspek Kelembagaan, terdiri dari peningkatan dan pemanfaatan institusi yang dapat mengatur kepentingan dalam pengambilan keputusan. Intitusi ini juga merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat SDM dan peraturan yang tepat dengan efisiensi kerja tinggi.
2. Aspek Sarana dan Prasarana, terdapat dua fungsi yaitu sebagai pemenuh kebutuhan pariwisata alam dan pengendali dalam pemeliharaan lingkungan yang seimbang.
3. Aspek Pengelolaan, pengembangan pengelolaan objek wisata alam untuk mendukung kegiatan pariwisata dengan pemanfaatan potensi objek wisata alam secara lestari.

4. Aspek Pengusahaan, yaitu memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
5. Aspek Pemasaran, dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Aspek Peran Serta Masyarakat, melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Aspek Penelitian dan Pengembangan, meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam.

1.5.7 Potensi Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan yang bisa dikembangkan. Sedangkan kata Pariwisata mempunyai arti sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perjalanan dengan tujuan rekreasi.

Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989).

Potensi internal objek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki objek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik objek, kualitas objek, dan dukungan bagi pengembangan. Potensi eksternal objek wisata adalah potensi wisata dapat mengembangkan suatu objek wisata dari segi fleksibilitas, fasilitas pendukung, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Potensi Pariwisata adalah kemampuan atau daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perjalanan atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata. Pembangunan pariwisata dapat dicakup dari segi ekonomi dan sosial budaya.

Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi yang ada tersebut secara umum dibagi menjadi dua:

1. Potensi Budaya

Potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat misalnya adat istiadat, mata pencaharian, kesenian dan sebagainya.

2. Potensi Alamiah

Potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik geografis seperti potensi alam.

1.5.8 Pengembangan Daya Tarik

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa unsur daya tarik sebuah objek wisata adalah:

1. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan.
2. Daya tarik wisata berupa alam, budaya, dan hasil karya manusia yang berseni tinggi dan dapat dijadikan menjadi suatu produk.
3. Sasaran utama produk pariwisata adalah wisatawan.

Objek wisata yang memiliki daya tarik dikemas sedemikian rupa sehingga menarik minat para pengunjung. Terdapat kriteria dalam membangun suatu objek wisata (Suwanto, 1997):

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang sedang melakukan perjalanan.

Daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Dalam arti, daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat (Ismayanti, 2009). Potensi daya tarik wisata memiliki beberapa tujuan diantaranya;

1. Memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi berupa devisa negara dan pertumbuhan ekonomi serta dari segi sosial berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kemiskinan.
2. Menghapuskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.

3. Memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, sekaligus mengangkat citra bangsa dan memperkuat jati diri bangsa, memupuk rasa cinta tanah air melalui perusahaan daya tarik dalam negeri.
4. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, sekaligus memajukan kebudayaan melalui pemasaran pariwisata.
5. Mempererat persahabatan antar bangsa dengan memahami nilai agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

1.5.9 Pengembangan Objek Wisata

Dalam membangun suatu objek wisata harus dirancang sesuai dengan potensi daya tarik yang dimiliki (Suwanto, 1997). Suatu pengembangan daya tarik yang berhasil, harus memiliki kriteria kelayakan antara lain:

1. Kelayakan Finansial

Kelayakan dalam hal *finansial* memiliki hubungan mengenai perhitungan secara komersial dalam mengembangkan suatu objek wisata.

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun sebuah objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, dan pertanian.

3. Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tanpa ada paksaan dalam proses

pembangunan objek wisata, daya tarik wisata akan mengikuti dengan sendirinya seiring berjalannya pembangunan.

4. Layak lingkungan

Dalam pembangunan objek wisata, analisis lingkungan dapat dijadikan sebagai acuan. Pembangunan tidak boleh merusak lingkungan sekitarnya namun hanya pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga kelestarian masih terjaga dengan baik.

Pengembangan objek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan objek wisata alam berkaitan erat dengan:

1. Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam.
2. Efektivitas fungsi dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait.
3. Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan objek wisata alam di kawasan hutan.
4. Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

1.5.10 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Nurasyiah & Rahmiati (2019)	Evaluasi Kinerja Kebijakan Sektor Pariwisata dalam mendukung Kota Serang sebagai Kota Kreatif	Analisis data <i>Mixed Methods</i> atau Metode Kombinasi (kuantitatif dan kualitatif)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata Kota Serang perlu dilakukan dengan cara mengadakan pembelajaran dan pelatihan di bidang pariwisata bagi aparat yang terkait, masyarakat, dan dunia usaha sektor pariwisata. Pengelolaan pembiayaan dan keuangan sektor pariwisata daerah seharusnya berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk <i>e-tourism</i> akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata dan berujung pada peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan.
2	M. Rafani (2013)	Rencana Induk Pengembangan Kampung Wisata Sahapm Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	Kualitatif dengan metode pendekatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan <i>masterplan</i> kampung wisata	1) Kawasan kampung wisata juga harus memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. 2) Penyediaan data dasar sosial dan ekonomi masyarakat sebagai salah satu wilayah pengembangan pariwisata harus didukung dengan upaya pengelolaan sumber daya

				yang ada. 3) Penyusunan <i>masterplan</i> Kampung Wisata Desa Sahapm ini dalam merupakan pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mengangkat Kabupaten Landak sebagai sentra kunjungan wisata.
3	Manullang, dkk (2016)	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Propinsi Jawa Tengah Di Destinasi Wisata Sam Poo Kong Kota Semarang	Teknik penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi dokumentasi	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi RIPP Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di destinasi wisata Sam Poo Kong Kota Semarang belum dapat mengatasi permasalahan pariwisata di Kota Semarang sehingga perlu dibuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Semarang. Untuk memperjelas pengembangan pariwisata Sam Poo Kong secara teknis maka diperlukan juga suatu SOP.
4	Wazni, dkk (2020)	Evaluasi Input Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Siak	Penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, dengan teori evaluasi kebijakan Stufflebeam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari dukungan input kebijakan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana strategis pengembangan pariwisata serta dukungan anggaran. Di Kabupaten Siak, sumber daya

				<p>manusia yang bekerja pada Dinas pariwisata masih terbatas secara kualitas dan kuantitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu sarana pemasaran dan promosi pariwisata. Dilihat dari regulasi, Kabupaten Siak memiliki keunggulan regulasi melalui visi daerah yang berorientasi pada kebudayaan dan pariwisata, tersedianya <i>roadmap</i> kebudayaan melayu dan PERDA yang mengatur tentang bahasa dan pakaian melayu. Sedangkan dari aspek pendanaan, penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisata masih belum maksimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan.</p>
5	Saputro (2014)	Evaluasi Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi	Dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di

				lapangan dalam proses pengembangan objek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif. Metode ini disesuaikan dengan jenis penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif (Wardiyanta, 2006:5).

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi masyarakat umum, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bontang, Dewan Adat Kota Bontang, Kelompok Sadar Wisata Kuala Abadi, BAPPEDA, DISPOPAR, DPRD Kota Bontang dan elemen serta instansi terkait yang ada di Kota Bontang.

1.7 Jenis Data Penelitian

1.7.1 Data Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya dimaksudkan untuk menggabungkan informasi tentang kualitas suatu fakta yang ada yaitu keadaan atau fakta menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2003:309).

1.7.2 Data Primer

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu metode wawancara. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam mendapatkan data primer dengan cara memberikan berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan kepada informan utama. Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat umum, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bontang, Dewan Adat Kota Bontang, Kelompok Sadar Wisata Kuala Abadi, BAPPEDA, DISPOPAR, DPRD Kota Bontang, dan elemen serta instansi terkait yang ada di Kota Bontang.

1.7.3 Data Sekunder

Metode analisis data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Studi pustaka melalui bacaan dan *browsing* melalui internet. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemekaran wilayah dan dampaknya. Adapun teknik pengambilan data sekunder yang dipakai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket), mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya kepada responden seperti wawancara. Teknik dokumen, yaitu mengumpulkan data dengan sumber non manusia, non *human resources*, diantaranya yaitu dokumen dan bahan statistik.
2. Teknik triangulasi, yaitu mengumpulkan data yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data juga sumber data yang sudah ada. Terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis.

Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini meliputi empat komponen yaitu:

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.

2. Reduksi dan kategorisasi data (*Reduction*)

Melakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian semua data.

3. *Display* data

Menyajikan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu.

4. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan

Apabila pada hasil *display* data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan maka dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan.